

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian terkait kedudukan dan peran Dinas Sosial Kota Cirebon dalam penyaluran program bantuan BPNT, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 51 ayat (6) Permensos No. 20 tahun 2019, Dinas Sosial Kota Cirebon dalam penyaluran BPNT memiliki kedudukan sebagai Tim Koordinator daerah kabupaten/kota yang merupakan petugas yang berada di daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota. Kedudukan yang dimiliki Dinas Sosial Kota Cirebon dalam penyaluran program BPNT merupakan wujud dari tugas perbantuan dalam bidang kesejahteraan sosial kepada Wali Kota. Sebagai tenaga pelaksana penyaluran program BPNT, Dinas Sosial Kota Cirebon memiliki tugas pokok, diantaranya: (1) Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan juga aparat pemerintahan tingkat kecamatan dan desa, serta pihak-pihak yang terkait dengan program BPNT terkait program tersebut. (2) Melakukan koordinasi pelaksanaan BPNT, tugas ini dilaksanakan untuk mendapatkan data yang valid berkaitan dengan data penerima bantuan program BPNT. (3) Survey calon agem E-Warong, Dinas Sosial Kota Cirebon berkoordinasi dengan Bank Penyalur mengenai pemetaan lokasi dan pemilihan pedagang-pedagang bahan pangan untuk menjadi e-Warong. (4) Melakukan pengelolaan dan pemutakiran data. (5) Pemantauan terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan BPNT.
2. Secara garis besar keberhasilan penyaluran bantuan program BPNT di kota Cirebon sudah berjalan sesuai dengan 6 aspek yaitu: (1) Tepat sasaran, penerima bantuan program BPNT di Kota Cirebon merupakan masyarakat yang sudah terdata pada data BDT (Basis Data Terpadu) sehingga data nya

secara umum mereka termasuk warga miskin. (2) Ketepatan jumlah sudah sesuai dengan ketentuan yakni dengan jumlah nominal bantuan sebesar RP. 200.000 / KPM per bulan yang di berikan dalam bentuk sembako. (3) Ketepatan waktu bantuan yang di berikan sudah rutin di lakukan setiap bulannya, meskipun untuk tanggalnya tidak pasti. (4) Ketepatan harga komoditi yang diberikan ini sesuai dengan jumlah uang yang diterima KPM sebesar Rp.200.000 mendapatkan beras ada kacang-kacangan seperti kacang hijau/kacang tanah. (5) Ketepatan kualitas barang yang diberikan memiliki kualitas yang baik. (6) Ketepatan administrasi penyaluran bantuan program BPNT di kota Cirebon sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Program BPNT merupakan pengeluaran negara yang dilakukan berdasarkan kemaslahatan umum dan tidak digunakan untuk hal yang sia-sia. Program ini merupakan bentuk wujud negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan sebagian pangan pada masyarakat miskin. Program BPNT merupakan salah satu program pemerintah untuk memenuhi sebagian kebutuhan bahan pangan yang didistribusikan kepada masyarakat miskin. Sebagaimana pendapat Al-Mawardi yang menyatakan bahwa pendistribusian zakat diberikan kepada orang-orang fakir miskin hanya pada taraf sekadar untuk membebaskan dari kemiskinan. Program BPNT juga memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang, dimana tujuan tersebut dapat tercapai dengan proses penyaluran dan distribusi kepada yang lebih berhak secara tepat sasaran serta memperhatikan dari makna pemenuhan kebutuhan demi kemaslahatan program dan masyarakat penerima manfaat.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemutakhiran data keluarga miskin yang melibatkan pemerintah Kelurahan, Ketua RW, dan Ketua RT untuk mengetahui keluarga yang benar-benar miskin dan layak mendapatkan bantuan.
2. Adanya pembaharuan data yang dilakukan oleh petugas yang bersangkutan dan diserahkan ke pusat.
3. Bahan pangan yang tersedia di setiap E-Warung lebih diperhatikan dengan menyediakan berbagai macam kebutuhan pangan yang ditetapkan pemerintah agar program ini mencapai tujuan pemenuhan gizi masyarakat miskin tercapai secara optimal.
4. Perlu dilakukan penelitian lebih luas bagi peneliti selanjutnya terhadap penyaluran BPNT yang di berikan kepada masyarakat penerima agar data penerima dan penyediaan bahan pangan yang tersedia di E-Warung benar-benar bermanfaat bagi KPM.

